



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310  
TELEPON (021) 31928280, 31928285; FAKSIMILE (021) 3103705  
[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

Nomor : **900** /P.01/06/2019  
Lampiran : 3 (tiga) berkas  
Perihal : **Pemanggilan Calon Peserta Program  
S2 Dalam Negeri Tahun 2019**

**18** Juni 2019

Yth.

1. Kepala Biro Kepegawaian/SDM Kementerian/Lembaga;
2. Kepala BKD/Biro Kepegawaian/SDM Provinsi/Kabupaten/Kota.  
(daftar terlampir)

Sehubungan dengan telah selesainya proses seleksi dan penempatan untuk program S2 Dalam Negeri tahun 2019, dengan ini kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut :

1. Staf Saudara (terlampir) telah terseleksi menjadi calon karyasiswa Program S2 Dalam Negeri tahun 2019 yang dilaksanakan di 25 (dua puluh lima) program studi pada 11 (sebelas) perguruan tinggi di Indonesia.
2. Dalam rangka memenuhi kelengkapan administrasi, seluruh calon karyasiswa diwajibkan:
  - a) Menyiapkan dokumen kelengkapan administrasi 5 (lima) surat sesuai format terlampir, yang terdiri dari Surat Tugas, Surat Izin Mengikuti Program Studi, Surat Perjanjian, Surat Pernyataan Penempatan Kembali dan Surat *Cost Sharing* serta mengunggah/upload dalam *website* Pusbindiklatren Bappenas di [www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/pemantauan](http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/pemantauan);
  - b) Mengunggah/upload Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Rekening Tabungan dalam *website* Pusbindiklatren di [www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/pemantauan](http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/pemantauan).
3. Seluruh kelengkapan administrasi dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian 1 (satu) asli cap basah dan 1 (satu) salinan cap basah. Kelengkapan administrasi tersebut dikirimkan kepada Pusbindiklatren Bappenas (Kelengkapan Berkas Beasiswa Diklat Gelar 2019) dengan alamat Jalan Proklamasi No 70, Jakarta Pusat 10320, **paling lambat tanggal 22 Juli 2019**.
4. Seluruh calon karyasiswa diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) Bersedia menerima sanksi apabila Pusbindiklatren dan/atau Program Studi menemukan informasi yang berbeda mengenai: a) Status Kepegawaian seperti masa kerja dan pangkat/golongan ruang; b) Status pendidikan terakhir baik yang telah selesai maupun yang sedang dijalani, misalnya calon penerima beasiswa Pusbindiklatren sudah berpendidikan S2 atau sedang mengikuti program S2 di tempat lain; dan c) Informasi lainnya yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pusbindiklatren Bappenas ataupun program studi.
  - b) Tidak mengambil cuti akademis dengan alasan apapun;
  - c) Mengikuti semua prosedur dan ketentuan yang ditetapkan masing-masing Program Studi;
  - d) Memberikan konfirmasi kepada Pusbindiklatren apabila tidak bersedia mengikuti program studi yang ditandatangani serendah-rendahnya oleh Pejabat Eselon II yang menangani

urusan kepegawaian (Badan Kepegawaian dan/atau Biro Sumber Daya Manusia) sesuai dengan jadwal penempatan terlampir dan/atau tidak mendapatkan izin dari atasan.

- e) **Jika calon peserta mengundurkan diri SETELAH tanggal 1 Juli 2019, yang bersangkutan DIWAJIBKAN untuk mengganti biaya seleksi yang telah dikeluarkan Pusbindiklatren Bappenas.**

Selain itu, dapat kami informasikan bahwa Pusbindiklatren Bappenas memutuskan untuk memanggil calon peserta yang memiliki nilai TOEFL masih di bawah standar program studi, dengan catatan yang bersangkutan **DIWAJIBKAN** untuk menyerahkan nilai ITP TOEFL minimal sesuai dengan standar masing-masing program studi dalam kurun waktu 1 tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan program studi dengan biaya ditanggung oleh masing-masing calon karyasiswa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk segera menyampaikan informasi ini kepada calon peserta yang tercantum dalam lampiran dan membantu proses pengurusan administrasi yang diperlukan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama seluruh pihak, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan  
dan Pelatihan Perencana



Guspika

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal/Utama Kementerian/Lembaga (terlampir);
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (terlampir);
4. Ketua Program Studi;
5. Kepala Unit Kerja Calon Karyasiswa Program Beasiswa;
6. PPK Program PPN X Kementerian PPN/Bappenas.

**Yth.**

- 1 Badan Kepegawaian Negara
- 2 Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 3 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- 4 Badan Pemeriksa Keuangan
- 5 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
- 6 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- 7 Badan Pusat Statistik
- 8 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
- 9 Kementerian Dalam Negeri
- 10 Kementerian Hukum dan HAM
- 11 Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- 12 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 13 Kementerian Ketenagakerjaan
- 14 Kementerian Keuangan
- 15 Kementerian Kominfo
- 16 Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- 17 Kementerian Koordinator Perekonomian
- 18 Kementerian Luar Negeri
- 19 Kementerian Pariwisata
- 20 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 21 Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- 22 Kementerian Perdagangan
- 23 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas
- 24 Kementerian Perhubungan
- 25 Kementerian Perindustrian
- 26 Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- 27 Lembaga Administrasi Negara
- 28 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- 29 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 30 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- 31 Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
- 32 Pemerintah Kabupaten Agam
- 33 Pemerintah Kabupaten Banggai
- 34 Pemerintah Kabupaten Bantaeng

- 35 Pemerintah Kabupaten Bantul
- 36 Pemerintah Kabupaten Barru
- 37 Pemerintah Kabupaten Belitung
- 38 Pemerintah Kabupaten Blitar
- 39 Pemerintah Kabupaten Blora
- 40 Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
- 41 Pemerintah Kabupaten Buton Selatan
- 42 Pemerintah Kabupaten Cilacap
- 43 Pemerintah Kabupaten Gowa
- 44 Pemerintah Kabupaten Jepara
- 45 Pemerintah Kabupaten Jombang
- 46 Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
- 47 Pemerintah Kabupaten Kendal
- 48 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
- 49 Pemerintah Kabupaten Klaten
- 50 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
- 51 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
- 52 Pemerintah Kabupaten Lamongan
- 53 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
- 54 Pemerintah Kabupaten Magelang
- 55 Pemerintah Kabupaten Magetan
- 56 Pemerintah Kabupaten Malang
- 57 Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
- 58 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
- 59 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
- 60 Pemerintah Kabupaten Nganjuk
- 61 Pemerintah Kabupaten Nias Barat
- 62 Pemerintah Kabupaten Pasang Kayu
- 63 Pemerintah Kabupaten Pasuruan
- 64 Pemerintah Kabupaten Pati
- 65 Pemerintah Kabupaten Pekalongan
- 66 Pemerintah Kabupaten Pematang
- 67 Pemerintah Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir
- 68 Pemerintah Kabupaten Pohuwato
- 69 Pemerintah Kabupaten Purbalingga
- 70 Pemerintah Kabupaten Sampang
- 71 Pemerintah Kabupaten Sanggau
- 72 Pemerintah Kabupaten Semarang

- 73 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
- 74 Pemerintah Kabupaten Sleman
- 75 Pemerintah Kabupaten Tegal
- 76 Pemerintah Kabupaten Temanggung
- 77 Pemerintah Kabupaten Trenggalek
- 78 Pemerintah Kabupaten Tulungagung
- 79 Pemerintah Kota Bandung
- 80 Pemerintah Kota Bekasi
- 81 Pemerintah Kota Cilegon
- 82 Pemerintah Kota Kediri
- 83 Pemerintah Kota Langsa
- 84 Pemerintah Kota Madiun
- 85 Pemerintah Kota Magelang
- 86 Pemerintah Kota Makassar
- 87 Pemerintah Kota Mojokerto
- 88 Pemerintah Kota Padang
- 89 Pemerintah Kota Pangkalpinang
- 90 Pemerintah Kota Pematangsiantar
- 91 Pemerintah Kota Semarang
- 92 Pemerintah Kota Solok
- 93 Pemerintah Kota Tanjungpinang
- 94 Pemerintah Provinsi Aceh
- 95 Pemerintah Provinsi Banten
- 96 Pemerintah Provinsi Bengkulu
- 97 Pemerintah Provinsi DIY
- 98 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 99 Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- 100 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- 101 Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- 102 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- 103 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- 104 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 105 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 106 Pemerintah Provinsi Maluku Utara
- 107 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- 108 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

**DAFTAR KARYASISWA PROGRAM S2 DALAM NEGERI  
MAGISTER ILMU LINGKUNGAN, UNIVERSITAS DIPONEGORO  
BEASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2019**

NO	NAMA	NIP	INSTANSI	KOTA/KAB	PROV
1	Agus Sudrajat	198508142015021001	Pemerintah Kabupaten Cilacap	Kabupaten Cilacap	JATENG
2	Andi Kurniawan	198405112011011007	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Pati	JATENG
3	Arifah Wulansari	198306242006042005	Pemerintah Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	DIY
4	Asri Cahaya Hati	198604112010012032	Pemerintah Provinsi Jawa Timur		JATIM
5	Cipta Eratama	199003182010101003	Kementerian Dalam Negeri	Kabupaten Agam	SUMBAR
6	Evta Rina Mailisa	198505082015042002	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Kota Denpasar	BALI
7	Ganjar Primandaru	198610072009031004	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang	JATENG
8	Inun Setyani	198410302010012026	Pemerintah Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	JATENG
9	Lusia Agung Megawati	198501012005022001	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	Kota Padang	SUMBAR
10	Shofiyatul Afidah	198704242015032002	Pemerintah Provinsi Banten	Kota Jakarta Pusat	BANTEN

### **JADWAL PENEMPATAN S2 DALAM NEGERI TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>KETENTUAN</b>	<b>PELAKSANAAN</b>
1	Serah terima peserta Dalam Negeri (H)	17 Juni 2019
2	Batas akhir pemanggilan peserta (H + 7)	24 Juni 2019
4	Batas akhir pengunduran diri	1 Juli 2019
5	Pemberitahuan/konfirmasi dari Prodi (H + 21)	8 Juli 2019
6	Konfirmasi daftar peserta final (H + 28)	15 Juli 2019
7	Kelengkapan persyaratan 5 dokumen/formulir + kalender akademik + SK Rektor untuk SPP (H + 35)	22 Juli 2019
8	Kelengkapan dokumen Nota Persetujuan + NPWP + Copy buku rekening bank (H + 42)	29 Juli 2019

**SURAT PERJANJIAN**  
**BEASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS**

Berdasarkan surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas Nomor: ..... tanggal ....., perihal: ....., bahwa saya telah diterima di ..... dan direncanakan mulai kuliah pada bulan ....., 2019. Sehubungan dengan hal tersebut saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan/Pekerjaan : .....  
Lembaga : .....  
Alamat : .....

Menerangkan dengan sungguh–sungguh atas kehendak sendiri dan semata–mata untuk mendapat pendidikan dan pelatihan program gelar dengan menerima syarat–syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban–kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1961, Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961, Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, dan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembiayaan Bersama Dalam Penyelenggaraan Program Beasiswa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Saya menyatakan dan berjanji :

1. Akan menegakkan dan mematuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan bagi penerima beasiswa Pusbindiklatren;
2. Akan menghindari segala rupa perbuatan tercela baik sebagai pegawai tugas belajar maupun sebagai anggota masyarakat;
3. Akan mengikuti perkuliahan tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya;
4. Akan selalu memberikan informasi perkembangan studi dan juga *upload* segala kelengkapan berkas yang dibutuhkan untuk lapor diri melalui aplikasi E-Monev;
5. Bersedia mengisi kuesioner dan memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh Pusbindiklatren Bappenas selama dan setelah penyelenggaraan diklat gelar;
6. Bersedia menerima sanksi apapun dari Pusbindiklatren jika: a) Dalam proses seleksi, penempatan, maupun selama mengikuti diklat ditemukan ketidaksesuaian data yang saya informasikan dalam Formulir Calon Penerima Beasiswa Pusbindiklatren dengan kriteria seleksi Pusbindiklatren yang tercantum dalam buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana; serta b) Melanggar ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren maupun oleh program studi;
7. Setelah menyelesaikan studi saya akan kembali bekerja sebagai pegawai negeri selama sekurang–kurangnya 2 kali masa studi saya (2n tahun);
8. Akan mengembalikan seluruh biaya yang ditentukan oleh Pusbindiklatren kepada Kas Negara, jika: a) Terjadi kegagalan studi karena kelalaian saya; b) Mengundurkan diri selama masa studi berlangsung; atau c) Mengundurkan diri dari instansi kerja saya sebelum masa 2n terpenuhi;
9. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana beasiswa termasuk namun tidak terbatas pada biaya seleksi, *tuition fee*, dan *living allowance*, bila telah dibayarkan oleh Pusbindiklatren;

Apabila saya merupakan karyasiswa program *Linkage* dan Reguler Luar Negeri, saya juga berjanji:

10. Akan menanggung seluruh biaya pendidikan jika gagal berangkat ke Luar Negeri dan belum bisa menyelesaikan perkuliahan reguler dalam negeri dalam kurun waktu maksimal 18 bulan;
11. Memberi informasi perkiraan keputungan 3 (tiga) bulan sebelum masa studi berakhir, serta langsung melaporkan keputungan dan status studi setelah kelulusan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal keputungan.

Jika saya melanggar ketentuan–ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Mengetahui,  
Pimpinan Instansi (Minimal Eselon II)

Nama Kota, ....., 2019  
Yang Berjanji,

(Cap Basah stempel)

(Tanda tangan dan Materai 6000)

(.....)  
NIP.

(.....)  
NIP.

# KOP SURAT KANTOR YBS

## SURAT TUGAS BELAJAR NOMOR...../...../...../2019

Menimbang : a. bahwa.....  
b. bahwa.....

Dasar : Surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana  
Bappenas Nomor : ..... tanggal ....., perihal : .....,

### Memberi Tugas:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Untuk : melaksanakan tugas belajar pada program S2 Dalam Negeri:  
Perguruan Tinggi : .....  
Tingkat : Magister/Doktoral (Pilih Salah Satu)  
Nama Program Studi : .....  
Terhitung mulai : .....  
Lama Studi : .....

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

(nama kota), .....2018  
Mengetahui,  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah\*

(Cap Basah)

(.....)  
NIP.

### Tembusan:

1. Gubernur/Bupati/Walikota
2. Pimpinan Unit Kerja Ybs.
3. Kepala Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas
4. PPK PPN X, Kementerian PPN/Bappenas

### \*Keterangan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kepala Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga atau unit kerja eselon II yang bertanggung jawab mengeluarkan surat tugas;
2. Format dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi;
3. Format Surat Tugas sesuai dengan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 80 Tahun 2012.

# KOP SURAT KANTOR YBS

---

## SURAT IZIN MENGIKUTI PROGRAM STUDI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Instansi : .....

Dengan ini mengizinkan Saudara (.....) untuk mengikuti :

Program : Magister/Doktoral (Pilih Salah Satu)  
Nama Program Studi : .....  
Perguruan Tinggi : .....  
Tahun Akademik : .....  
Lama Studi : .....

Demikian surat pernyataan ini saya tandatangani untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(nama kota), .....2019

Pejabat yang Memberikan Izin,  
Atasan Langsung (Minimal Eselon II)

(Cap Basah dan Materai 6000)

(.....)  
NIP.

# KOP SURAT KANTOR YBS

Nomor : ..... (tempat/tgl/bln/th)  
Lampiran : ..... (berkas)  
Hal : **Kesedian Pembiayaan Diklat**  
an.: 1. Sdr/Sdri. X  
2. Sdr/Sdri. Y  
3. Sdr/Sdri. Z

Kepada Yth.:

**Kepala Pusbindiklatren  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas**

Sehubungan dengan surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas Nomor : ..... tanggal ....., perihal : ....., dengan ketentuan pembiayaan *cost sharing* untuk program gelar yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr/Sdri. X, Y, Z dengan pengaturan biaya sebagai berikut:

NO	NAMA PESERTA	ITEM MANDATORY	ITEM VOLUNTARY	JUMLAH
1	X			
2	Y			
3	Z			

Demikian, mohon kami mendapat jawaban atas usulan kami tersebut di atas dalam waktu tidak terlalu lama. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah

(Cap Basah)

(.....)

NIP.

Tembusan Yth.:

1. Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Penyelenggara Diklat (Program Studi);
3. Sesmen PPN/Sestama Bappenas;
4. Peserta diklat yang bersangkutan.

## **Catatan:**

Mandatory : adalah porsi pendanaan yang menjadi **kewajiban** instansi asal berupa: a) Transport kedatangan dan kepulangan ke lokasi studi (kecuali ke luar negeri atau program *linkage*); b) Uang saku.

Voluntary : adalah porsi pendanaan yang secara **sukarela** akan ditanggung oleh instansi asal.

**SURAT PERNYATAAN  
RENCANA PENEMPATAN KEMBALI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Instansi : .....

menyatakan mengizinkan Saudara (.....) untuk mengikuti :

Program : Magister/Doktoral (Pilih Salah Satu)  
Nama Program Studi : .....  
Perguruan Tinggi : .....  
Tahun Akademik : .....  
Lama Studi : .....

Selanjutnya, setelah yang bersangkutan menyelesaikan program tersebut diatas, akan ditempatkan pada unit perencanaan atau unit kerja yang sesuai dengan kompetensi dan atau bidang studi yang ditempuh oleh yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini saya tanda tangani untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(nama kota), .....2019

Yang Menyatakan,  
Kepala Badan Kepegawaian/Biro SDM

(Cap Basah dan Materai 6000)

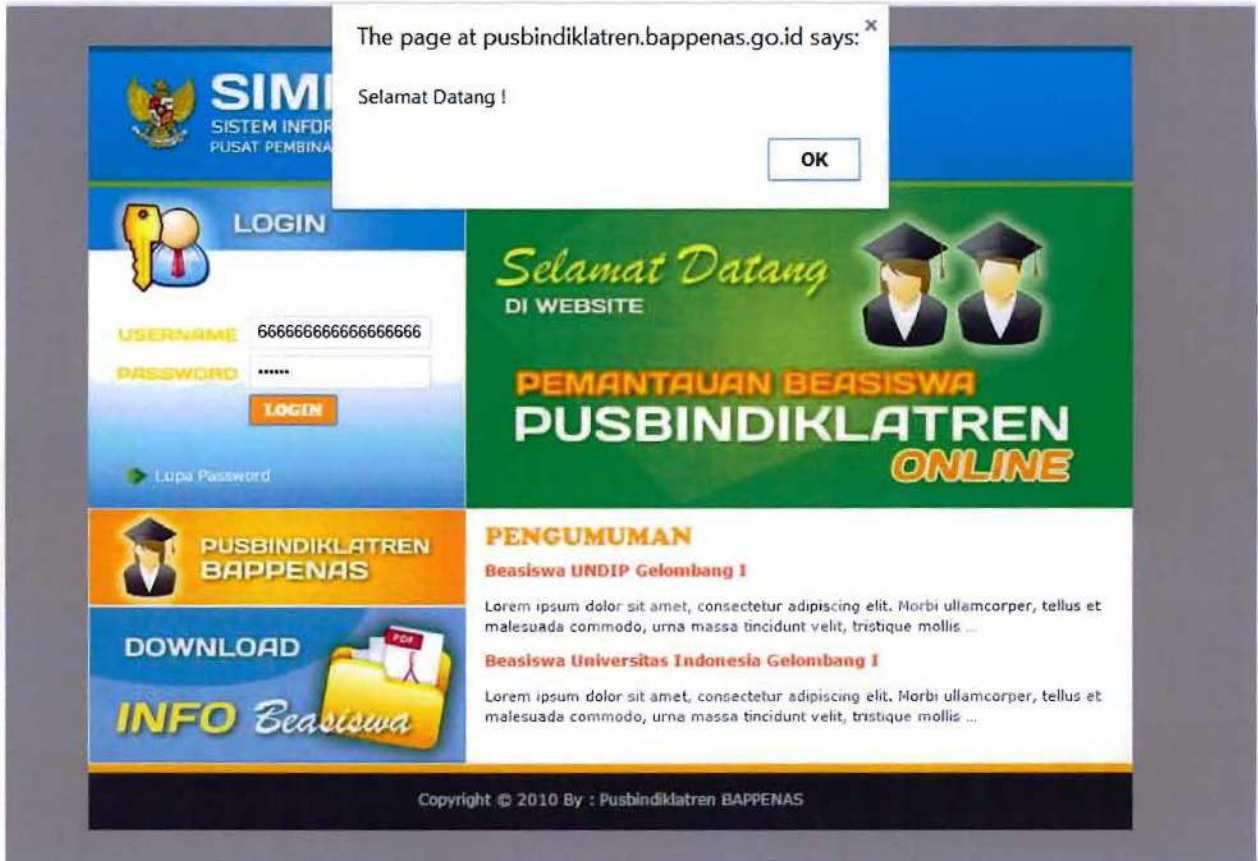
(.....)

Tembusan:

Atasan langsung yang bersangkutan.

## PEDOMAN UPLOAD NPWP DAN REKENING TABUNGAN

1. Seluruh calon peserta yang telah memenuhi persyaratan untuk ditempatkan dipersilahkan untuk menuju website Pusbindiklatren Bappenas bagian pemantauan : [www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/pemantauan](http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/pemantauan)
2. Masukkan Username dan password (username dan password samadengan yang digunakan saat pendaftaran).



3. Jika sudah berhasil login, pilih RPK/NPWP/REKENING.



4. Lalu lengkapi sedetail mungkin Nomor Rekening dan Bank serta NPWP pada kolom yang telah disediakan. Jika sudah selesai, klik Submit. (Jika terdapat kendala dapat email ke [pusbindiklatren@gmail.com](mailto:pusbindiklatren@gmail.com))

pusbindiklatren.bappenas.go.id/pemantauan/index.php?module=rek

16. Provinsi		DKI Jakarta
17. Kabupaten / Kota		Kota Jakarta Pusat
24. Jabatan		STAF Golongan : IIIIB
16. No Telepon		021 3193144
16. No Fax		021 3103705
<b>TEMPAT STUDI</b>		
26. Program Studi		MAGISTER PERENCANAAN & KEBIDJARAN PUBLIK UI
Universitas		UI
27. Tahun Masuk		2013
28. Jangka Waktu		
29. TOEFL Akhir		0.00
30. IPK Akhir		
<b>ALAMAT SELAMA STUDI</b>		
16. Alamat Jalan		16000
18. Provinsi		Bali
17. Kabupaten / Kota		Kabupaten Badung
24. No Telepon Studi		No Telepon Studi
24. HP		HP
<b>NO REKUNING, BANK NPWP</b>		
26. NPWP		00
No. Rekening		00
27. Nama Bank		00
28. Atas Nama		00
<b>RENCANA TEMPAT KERJA SETELAH STUDI</b>		
36. Rencana Tempat Kerja Setelah Studi		000
<b>Submit</b>		